

**ANALISIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU
SUMATERA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**Nama : LUTHFI TANIA SARAGIH
NPM : 1905180048
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : LUTHFI TANIA SARAGIH
NPM : 1905180048
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SUMATERA.

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si.)

Penguji II



(SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si.)

Pembimbing



(Dr. RITA HANDAYANI, SEL., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)



Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : LUTHFI TANIA SARAGIH
NPM : 1905180048
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : Jl. UTAMA GG. AMPERA 1 NO. 240D MEDAN
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SUMATERA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

Dr. RITA HANDAYANI, SEL., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

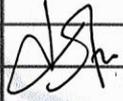
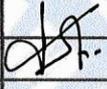
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Luthfi Tania Saragih
N.P.M : 1905180048
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat Rumah : Jl. Utama GG. Ampera 1 NO. 240D Medan
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1 Agustus 2023	Bab I		
	Bab II		
	Bab III		
7 Agustus 2023	Metodologi pendalaman Bab IV Mengolah data		
15 Agustus 2023	Uji Hausman Uji Chow Fix effect & common effect & Random		
22 Agustus 2023	Bab IV Hasil penelitian		
18 Agustus 2023	Bab IV dan Bab V Hasil penelitian & kesimpulan		
21 Agustus 2023	Bab IV dan Bab V Hasil penelitian, kesimpulan & daftar pustaka		
28 Agustus 2023	seluruh skripsi dan Acc sidang		

Pembimbing Skripsi



Dr. RITA HANDAYANI, SEI., M.Si.

Medan, Agustus 2023
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Luthfi Tania Saragih

NPM : 1905180048

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.



Luthfi Tania Saragih

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera

Luthfi Tania Saragih

Ekonomi Pembangunan

luthfisaragih893@gmail.com

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2017-2022 dan mengestimasi model pembangunan ekonomi antara variabel desentralisasi fiskal (DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa) dan PDRB Perkapita terhadap pengaruh IPM Pulau Sumatera tahun 2017-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui website- website resmi Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan objek penelitian 10 provinsi di Pulau Sumatera. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP secara serempak berpengaruh signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia di Pulau Sumatera tahun 2017-2022.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal ,Dana Desa, PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

Analysis of Fiscal Decentralization Policy on the Economic Development of Sumatra Island

Luthfi Tania Saragih

Economic development

luthfisaragih893@gmail.com

The fiscal decentralization policy is a consequence of the political decisions on decentralization or regional autonomy policies taken by the government. This study aims to analyze the economics descriptively regarding the development of fiscal decentralization policies for the economic development of Sumatra Island in 2017-2022 and estimate the economic development model between fiscal decentralization variables (DAU, DAK, DBH, and Village Funds) and GRDP per capita on the influence of HDI Sumatra Island 2017-2022 years. This research is a type of quantitative research. The data collection method used in this research is secondary data. The data collection technique used in this study was to collect secondary data through the official websites of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Central Bureau of Statistics (BPS), with the object of research being 10 provinces on the island of Sumatra. The data analysis technique in this study used panel data regression analysis with the help of the Eviews 12 program. The results of this study indicate that: DAU, DAK, DBH, DD, and PDRBKAP simultaneously have a significant effect on the human development index on the island of Sumatra in 2017-2022.

Keywords: Fiscal Decentralization, Village Funds, PDRB Capita, Human Development.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah aahirobbil'alami n. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai,yaitu Papa saya Tajuddin Saragih dan Ibu saya Sriyani yang selalu menjadi orang hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Dr. Prof. H. Januri S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Dr. Rita Handayani, SEI, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
10. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
11. Ibu Hafuzo Saragih yang selalu memberikan support positif kepada saya.
12. Abdillah Sani Tamimi Lubis yang paling spesial di hidup saya dan selalu memberikan semangat dan menemani saya saat mengerjakan skripsi.
13. Adik-adik saya Rajesh Yudhistira Saragih, Maghfirah Izzani Saragih, dan Rafa Al Hafis Saragih.
14. Sepupu yang selalu mensupport saya Tarisyah S.Ak.
15. Kepada teman-teman seperjuangan saya serta rekan kelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberikan informasi mengenai perkuliahan, dan memberikan semangat kepada saya.

Terimakasih , Wassamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Agustus 2023

Penulis

LUTHFI TANIA SARAGIH
NPM. 1905180048

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Akademik	12
1.6.2 Manfaat Non-akademik	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teoritis	13
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	13
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	17
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.4 Kebijakan Fiskal	23
2.1.5 Teori Pendapatan Nasional	29
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Regulasi/Kebijakan Pemerintah	35
2.3.1 Desentralisasi Fiskal	35
2.3.2 Dana Desa	36
2.3.3 Kebijakan Dana Desa	38
2.4 Kerangka Penelitian	39
2.4.1 Tahapan Penelitian	39
2.4.2 Kerangka Analisis	39

2.4.3	Kerangka Konseptual Model Etimasi	40
2.5	Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Pendekatan Penelitian	41
3.2	Definisi Operasional	41
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.4	Jenis dan Sumber Data	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6	Teknik Analisis Tujuan Penelitian	44
3.6.1	Analisis Ekonomi Deskriptif Mengenai Perkembangan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera Pasca Tahun 2017-2022	44
3.6.2	Analisis Model Ekonometrika.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1	Gambaran Umum Pulau Sumatera.....	55
4.1.1	Kondisi Geografis	55
4.1.2	Kondisi Topografi	56
4.1.3	Luas Wilayah	57
4.1.4	Kondisi Deografi.....	58
4.1.5	Kondisi Ekonomi	59
4.1.6	Kondisi Sosial	63
4.2	Analisis Tujuan Penelitian	67
4.2.1	Analisis Ekonomi Secara Deskriptif Tentang Perkembangan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera Tahun 2017-2022	67
4.2.2	Hasil Analisis Ekonometrika	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		84
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 PDB Indonesia ADHK 2022-2023.....	2
Gambar 2. 1 Kurva Peacock dan Wiseman	21
Gambar 2. 2 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrav	22
Gambar 2. 3 Kerangka Analisis Penelitian	39
Gambar 2. 4 Bagan Konseptual Model	40
Gambar 4. 1 Hasil Uji Chow	76
Gambar 4. 2 Hasil Etimasi Uji Hausman	77
Gambar 4. 3 Hasil Fixed Effect.....	78
Gambar 4. 4 Uji Multikolenialitas.....	78
Gambar 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	79
Gambar 4. 6 Hasil Uji t	81
Gambar 4. 7 Hasil Uji F	82
Gambar 4. 8 Hasil Uji Determinasi.....	83

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Seluruh Provinsi di Indonesia	4
Table 1. 2 Laju PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera	5
Table 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	42
Tabel 4. 1 Jumlah Kabupaten dan Kota Provinsi di Pulau Sumatera	57
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sumatera	58
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Sumatera 2022.....	59
Tabel 4. 4 Jumlah Nilai PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera.....	60
Tabel 4. 5 Jumlah PDRB Perkapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera.....	61
Tabel 4. 6 Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera	62
Tabel 4. 7 Inflasi Menurut Provinsi di Pulau Sumatera.....	63
Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Pulau Sumatera	64
Tabel 4. 9 Presentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera.....	64
Tabel 4. 10 Garis Kemiskinan di Pulau Sumatera.....	65
Tabel 4. 11 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera.....	66
Tabel 4. 12 Gini Rasio Provinsi di Pulau Sumatera	67
Tabel 4. 13 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah).....	72
Tabel 4. 14 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah).....	73
Tabel 4. 15 Perkembangan Dana Bagi Hasil di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah) 73	
Tabel 4. 16 Perkembangan Dana Desa Provinsi di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah).....	74
Tabel 4. 17 Perkembangan PDRB Perkapita di Pulau Sumatera (Ribu Rupiah)...	75
Tabel 4. 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Politik desentralisasi sebenarnya sudah pernah diwacanakan bahkan dilaksanakan pada era Presiden Soekarno sampai Presiden Suharto dengan program kebijakan percontohan otonomi daerah pada beberapa daerah tingkat II di Indonesia. Politik desentralisasi walau hanya sebagai proyek percontohan tetapi berjalan relatif lama sejak UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah mulai diberlakukan.

Desentralisasi fiskal yaitu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Selanjutnya dijelaskan tentang indikator capaian desentralisasi fiskal yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini rasio yang menurun, turunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Selain indikator juga dijelaskan tantangan desentralisasi fiskal, kebijakan transfer daerah dan dana desa, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, penggunaan dana desa, penyaluran transfer daerah dan dana desa yang ditujukan untuk

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Desentralisasi fiskal yang optimal melalui pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah, urusan pemerintahan yang ditangani pemerintah pusat dan urusan concurrent meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan bersifat pilihan. Terakhir dijelaskan mengenai transfer dan implementasi di Indonesia melalui mekanisme transfer dan UU HKPD.

Fenomena lain yang berkembang dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan semakin luasnya daerah otonom terutama daerah kabupaten/kota untuk menambah anggaran belanja pegawai daerah dalam APBD yang notabene juga bersumber dari anggaran transfer fiskal, khususnya anggaran DAU. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah, khususnya kabupaten/ kota sebagai penguasa tidak dapat diatur/ tidak tunduk kepada pemerintahan di atasnya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dikeluarkan dalam kerangka memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membantu mendorong perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonomi (PDB) daerah.



Sumber : BPS Indonesia

Gambar 1. 1 PDB Indonesia ADHK 2022-2023

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen.

Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat dilihat melalui PDB (Produk Domestik Bruto) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas harga Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini.

Desentralisasi telah mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum, selain itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat.

Desentralisasi telah mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang

aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum, selain itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat.

Ketergantungan transfer yang juga merupakan indikator dalam pelaksanaan desentralisasi menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka jumlah dana dari pemerintah pusat yang mengalir ke pemerintah di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia dalam bentuk dana perimbangan juga semakin meningkat.

Table 1. 1 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Seluruh Provinsi di Indonesia

Tahun	DBH	DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
2016	30.666.563.500	38.538.077.004	44.528.571.272	113.733.211.865
2017	33.535.350.810	55.763.530.032	59.998.473.695	149.297.354.493
2018	35.130.152.610	56.606.500.497	60.548.838.048	152.285.491.118
2019	34.326.791.971	58.691.805.994	66.244.328.451	159.262.926.416
2020	36.217.448.355	53.313.673.855	60.669.496.563	157.504.902.691
2021	32.443.354.278	67.973.780.481	74.738.449.422	167.851.300.263
2022				

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

Dari data tabel di atas dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan secara berkelanjutan terhadap jumlah yang dialokasikan ke daerah baik bagi semua jenis dana perimbangan yang mana Dana Alokasi Umum memiliki peran yang besar karena nilai yang diberikan sangat tinggi. Kemudian Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang terkecil di antara kedua dana tersebut.

Besarnya kedua peran DAU dan DBH menjadi bukti di mana masa desentralisasi ini pemerintah daerah mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat dalam rangka penggunaan dana menunjukkan bahwa penggunaan kedua jenis dana tersebut sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah pusat.

Kemudian Pulau Sumatera merupakan penyumbang kegiatan ekonomi terbesar kedua setelah Pulau Jawa, bagi perekonomian Indonesia. Meskipun sempat terdampak Pandemi Covid 19, saat ini perekonomian di Sumatera dan Indonesia secara umum sudah mulai bangkit. Pulau Sumatra merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari lima provinsi kaya di Indonesia, tiga provinsi terdapat di pulau Sumatra, yaitu provinsi Aceh, Riau dan Sumatra Selatan. Hasil-hasil utama pulau Sumatra ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara dan gas alam. Hasil-hasil bumi tersebut sebagian besar diolah oleh perusahaan-perusahaan asing.

Table 1. 2 Laju PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen)		
	2020	2021	2022
Aceh	-0.37	2.79	4.21
Sumatera Utara	-1.07	2.61	4.73
Sumatera Barat	-1.61	3.29	4.36
Riau	-1.13	3.36	4.55
Jambi	-0.51	3.69	5.13
Sumatera Selatan	-0.11	3.58	5.23
Bengkulu	-0.02	3.27	4.31
Lampung	-1.66	2.77	4.28
Kep. Bangka Belitung	-2.29	5.05	4.40
Kep. Riau	-3.80	3.43	5.09

Sumber : BPS Indonesia

Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat 10 provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki tingkat perekonomian baik. Beberapa provinsi lainnya, mengalami pertumbuhan antara 5 sampai 6 persen. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh merupakan yang paling rendah di Sumatera. Kondisi ini berbanding terbalik pada keadaan triwulan II-2020, dimana secara y-on-y, yaitu perekonomian Sumatera mengalami penurunan sebesar 3,17 persen. Menurut BPS, penurunan yang

terjadi pada triwulan II tahun lalu merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur yang sangat berarti dalam kajian ekonomi makro, dalam pandangan yang luas pertumbuhan ekonomi menandakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menciptakan perubahan dalam struktur social masyarakat yang dapat menciptakan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Widiaty & Nugroho, 2020).

Hingga saat ini, belum ada satu pun provinsi yang masuk dalam kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”. Enam provinsi telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, sebagian besar provinsi masuk pada kategori pembangunan manusia “sedang”. Dua puluh tujuh provinsi masuk pada kategori ini. Sayangnya, masih tersisa satu provinsi dalam kategori pembangunan manusia “rendah”. Satu-satunya provinsi yang masih berada pada kategori ini adalah Provinsi Papua. Apabila dilihat status capaian pembangunan manusia menurut pulau, terdapat variasi yang cukup menarik.

Di Pulau Sumatera, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Sementara provinsi lain masih berada pada status pembangunan manusia “sedang”. Di Pulau Jawa, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi” dan provinsi lain masih berada pada status “sedang”. Di Nusa Tenggara dan Bali, hanya Bali yang telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”, sementara dua provinsi di Nusa Tenggara masih berstatus “sedang”. Di Pulau Borneo, hanya

Kalimantan Timur yang telah mencapai status pembangunan manusia “tinggi” sementara provinsi lain masih berstatus “sedang”. Di Pulau Selebes, belum ada satu pun provinsi yang telah berstatus “tinggi”. Bahkan, di wilayah Maluku dan Papua masih terdapat provinsi yang berstatus “rendah”, yaitu Provinsi Papua

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada masyarakatnya, kemampuan ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan keharusan dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan ekonomi (Dinar and Hasan 2018).

Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan modal pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan kepada daerah.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional : mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas pemerintah secara profesional untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta

dapat mengelola sumber daya didalamnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta upaya yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya.(Prawidya Hariani:2018)

Pembangunan negara tak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa kebijakan pemerintah untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yaitu suatu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan fiskal. Melalui desentralisasi fiskal dapat dilihat pembangunan ekonomi daerah telah berjalan baik atau belum (Nazikha & Rahmawati, 2021).

Berdasarkan fenomena di lapangan, pertumbuhan ekonomi berperan dalam perkembangan suatu usaha bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan pendapatan yang dimiliki. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan memanfaatkan potensi sumber daya dimiliki secara optimal. Pada Negara berkembang membutuhkan aliran modal dalam hal investasi asing, utang luar negeri dan Teknologi dari negara maju untuk membangun negara. Modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi adalah modal Dihasilkan dari pendapatan yang disumbangkan oleh masyarakat bangsa. Selanjutnya, modal manusia terkait dengan peningkatan sumber daya manusia.

Table 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera

Provinsi	2021	2022	Rata Rata
Aceh	72,18	72,8	72,49
Sumatera Utara	72	72,71	72,35
Sumatera Barat	72,65	73,26	72,95
Riau	72,94	73,52	73,23
Jambi	71,63	72,14	71,88
Sumatera Selatan	70,24	70,9	70,57
Bengkulu	71,64	72,16	71,9
Lampung	69,9	70,45	70,17
Kep. Bangka Belitung	71,69	72,24	71,96
Kep. Riau	75,79	76,46	76,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional (BPS)

Sesuai dengan Tabel 1.3 nilai rata rata IPM sepuluh provinsi di Pulau Sumatera relatif meningkat, dimana di tahun 2021 nilai rata rata IPM adalah sebesar 71,65% dengan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan nilai IPM tertinggi yaitu sebesar 75,79%. Hingga tahun 2022 nilai IPM terus menguat menjadi 72,24% dan provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki nilai IPM tertinggi tetap dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai indeks sebesar 76,46%. Sejalan dengan data dapat disimpulkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera sehingga dapat menjadi indikasi menurunnya angka kemiskinan.

Seperti kebanyakan kasus di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera pelaksanaan Desentralisasi Fiskal seharusnya menghasilkan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan kemandirian daerah semakin baik serta kinerja pembangunan daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang rendah.

Harapan besar dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah memberi manfaat seperti perbaikan layanan umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengetasan

kemiskinan, manajemen ekonomi makro yang lebih baik serta sistim tata pemerintahan yang baik (Kumorotomo, 2008). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2015).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena Fakta bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal ternyata belum mampu membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “**Analisis Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ada pun identifikasi masalah yang muncul yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi indonesia mengalami penerunan pendapatan sehingga cenderung memperlambat kapasitas fiskal.
2. Desentralisasi Fiskal di Indonesia belum bisa menghasilkan kinerja keuangan daerah .
3. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi yang mengakibatkan pertumbuhan tidak dapat dikatakan stabil.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya di batasin pada masalah menganalisa seberapa besar faktor kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi Pulau Sumatera.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi Pulau Sumatera dari tahun 2017-2022?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi Pulau Sumatera?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2017-2022.
2. Melakukan etimasi dari model pembangunan ekonomi antara variabel desentralisasi fiskal (DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa) dan PDRB Perkapita terhadap pengaruh IPM Pulau Sumatera tahun 2017-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan Daerah. Manfaat yang dapat diambil diantaranya.

1.6.1 Manfaat Akademik

a. Bagi peneliti:

1. Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
2. Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
2. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.6.2 Manfaat Non-akademik

Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah. Penelitian ini dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan dari pendapatan total serta pendapatan perkapita memperhitungkan dengan adanya penambahan penduduk juga disertai perubahan fundamental dari struktur ekonomi sebuah negara serta pemerataan pendapatan untuk para penduduk dari suatu negara.

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi mengharuskan perubahan dalam struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, serta perubahan sikap, kebiasaan dan kepercayaan (Todaro & Smith, 2011). Namun disisi lain pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan percepatan pertumbuhan ekonomi, persoalan ketimpangan pendapatan, permasalahan kekurangan pangan, pengentasan kemiskinan, serta keterbatasan sumber daya.

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan

teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal

suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1817. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa:

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
- 2) “law of diminishing return” berlaku bagi tanah;
- 3) Persediaan tanah adalah tetap;
- 4) Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;

- 6) Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (given);
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
- 9) permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
- 10) Terdapat persaingan yang sempurna;
- 11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah.

B. Teori Thomas Robert Malthus

Jhingan (2012) dalam bukunya menyatakan Teori Thomas Robert Malthus, dimana Malthus berpendapat bahwa proses pemabangunan tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Menurutnya, proses pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dari naik turunnya perekonomian. Proses akumulasi modal merupakan salah satu faktor

terpenting terhadap proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya Malthus menyampaikan beberapa saran untuk proses pembangunan yaitu sebagai berikut:

- 1) Terciptanya pertumbuhan yang seimbang diberbagai sektor ekonomi.
- 2) Pendistribusian kesejahteraan dan kepemilikan atas tanah secara adil.
- 3) Melakukan perluasan perdagangan baik perdagangan internal maupun perdagangan eksternal.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI). HDI digunakan untuk membedakan apakah suatu negara maju, berkembang, atau terbelakang, dan juga digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dengan terpenuhinya fasilitas umum, masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usaha secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya menciptakan kehidupan yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat.

Menurut Ndakularak (dalam Putra dan Ulupui, 2015) angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya, IPM dapat dikategorikan menjadi empat seperti dibawah ini (BPS,2008:39 dalam Putra dan Ulupui, 2015):

- 1) Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ($IPM < 50$).
- 2) Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ($50 < IPM < 66$).

- 3) Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ($66 < IPM < 80$).
- 4) Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM \geq 80$).

Badan Pusat Statistik (BPS) ,IPM bisa digunakan sebagai alat ukur kinerja pembangunan manusia. Sedangkan menurut (Tulus, 2003:167) kualitas hasil pembangunan ekonomi dapat dilihat menggunakan IPM. IPM adalah indeks komposit berdasarkan tiga indikator: (a) kesehatan, (b) tingkat pendidikan, dan (c) standar hidup (Sayifullah & Gandasari, 2016). Menurut BPS, IPM merupakan salah satu indikator yang sangat dibutuhkan untuk menilai pembangunan. Pertama, tingkat pembangunan suatu negara atau wilayah dapat di tentukan dengan IPM.

Indikator yang digunakan di Indonesia dalam menghitung IPM adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Selama hampir dua dasawarsa, IPM terus digunakan digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan. Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report).

Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut (Manik & Hidayat, 2010):

1. Teori Wagner dan Pengikutnya

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin

meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

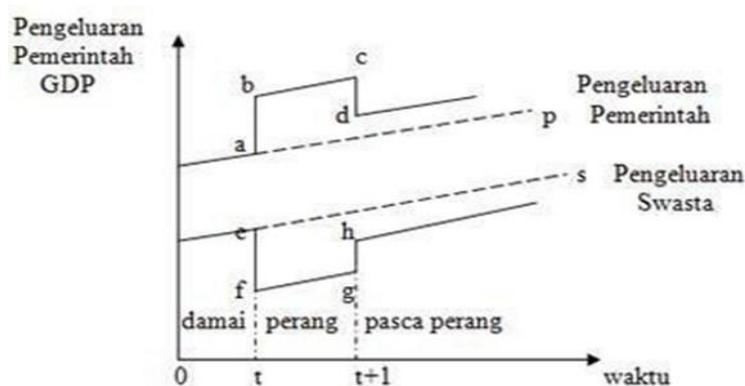
2. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP

bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.

Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:



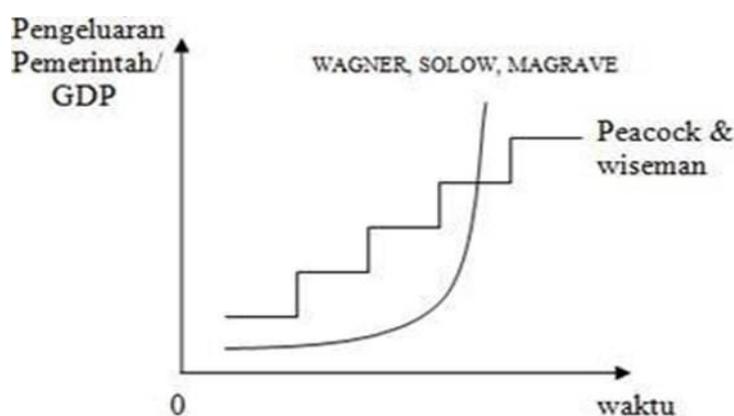
Sumber: Mangkoesobroto, 2001

Gambar 2. 1 Kurva Peacock dan Wiseman

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah

perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Sumber: Mangkoesoebroto, 2001

Gambar 2. 2 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrav

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

Sedangkan tujuan dari teori mikronya, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi

antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut.

2.1.4 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (*Great Depression*) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro Negara.

Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui *Indische Comptabiliteitswet* tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003.

Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat

kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.

A. Tujuan kebijakan fiskal

1. Menjaga dan mengamankan perekonomian Negara

Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.

2. Meningkatkan Kualitas SDM

Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya.

3. Menjaga Stabilitas Harga Barang

Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggungjawab.

4. Mendorong Investasi

Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

B. Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental.

- a. Kebijakan Fiskal Fungsional

Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya.

- b. Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana

Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha.

- c. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/Insidental

Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.

2. Dari Segi Penerapan

Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

3. Dari Segi Neraca Pembayaran

Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.

a. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya.

b. Kebijakan Fiskal Surplus

Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi.

c. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri.

d. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan.

C. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya:

1) Pajak

Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.

2) Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluarannya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.

3) Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat

4) Alokasi Anggaran

Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan.

2.1.5 Teori Pendapatan Nasional

1. Pengertian produk domestik regional bruto

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (BPS, 2012).

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

2. Metode perhitungan PDRB

a. Metode langsung

1) Pendekatan produksi

Dengan pendekatan Produksi (production approach) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

Q₁, Q₂, Q₃, dan Q_n = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

P₁, P₂, P₃, dan P_n = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

2) Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan (income approach) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

- a. Kompensasi untuk pekerja (compensation for employees), yang terdiri dari upah (wages) dan gaji (salaries) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.

- b. Keuntungan perusahaan (corporate profit), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (corporate profit taxes), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (stockholders) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.
- c. Pendapatan usaha perorangan (proprietors income), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari self employed person, misalnya petani, self employed profesional, dan lainlain.dengan perkataan lain proprietors income merupakan pendapatan new korporasi.
- d. Pendapatan sewa (rental income of person), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, rental business dan residential properties, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis real estate : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang non form yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan royalties yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
- e. Bunga netto (net interest) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya. Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = Y_w + Y_i + Y_{nr} + Y_{nd}$$

Dimana:

Y_w = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Y_r = Pendapatan dari bunga

Y_{nr} dan Y_{nd} = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (final demand) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X- M).

b. Metode tidak langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan karena dua faktor yaitu:

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk (kenaikan ri1).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak ri 1. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (ri 1) maka faktor yang harus dieliminir pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku, sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Hendra Kusuma (2016)	Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Independen : Desentralisasi Fiskal, Dana Transfer	Hasil etimasi dengan menggunakan random <i>effect</i> menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah, indikator desentralisasi fiskal yang di wakili kemampuan dana transfer terhadap pembentukan pandapatan daerah serta kontribusi pendapatan asli daerah terhada total pendapatan, menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama dari kontribusi belnaja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	Jihan Safitria (2022)	Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pulau Jawa 2016 – 2020	Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Independen :	hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan rasio kemandirian daerah, investasi daerah dan belanja daerah meningkat. Kemudian untuk perbandingan rasio kemandirian daerah, investasi daerah dan belanja daerah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan Pulau Jawa.

			Desentralisasi Fiskal	
3	Rahmat Esa Putraa, Yewiwati (2022)	Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara	<p>Dependen :</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Independen :</p> <p>derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, dan rasio belanja modal.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. sedangkan secara parsial (1) Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (2) ketergantungan transfer berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (3) rasio belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.</p>
4	Abdul Azis Dahlan Tampubolon Selly Prima Desweni (2022)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012-2020	<p>Dependen :</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Independen :</p> <p>Kebijakan Fiskal, Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan.</p>	<p>Adapun hasil dari analisis menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.</p>
5	Anisa Fitria, Weriantoni Bintang Rizky AMS3, Nur Ari Sufiawan4	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	<p>Dependen :</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Independen :</p> <p>PDRB, Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah, Jumlah Penduduk.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.</p>

2.3 Regulasi/Kebijakan Pemerintah

2.3.1 Desentralisasi Fiskal

Era baru Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Proses pelaksanaannya juga diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru, yakni UU no. 32 tahun 2004 mengganti UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU no. 33 tahun 2004 mengganti UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD).

Perubahan terutama berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dengan lahirnya kedua UU ini, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal, yakni hubungan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, maupun hubungan secara horisontal antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif baik ditingkat pusat maupun Daerah .

Menurut teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (*sentralisasi*) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah eksternalitas dan uang, yang kedua ialah preferensi.

Desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari 10 tahun di Indonesia secara perlahan telah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Nilai pertumbuhan dapat semakin besar ketika modal yang diterima oleh pemerintah daerah dialokasikan atau dibelanjakan pada sektor yang dapat memicu kegiatan ekonomi secara luas.

Seiring dengan besarnya limpahan wewenang dari pemerintah pusat, desentralisasi memberi dampak kepada biaya pelaksanaan pemerintahan yang semakin tinggi. secara rata-rata rasio transfer terhadap total pendapatan Provinsi mengalami penurunan hingga dibawah 50% di tahun 2012.

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

232 Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

233 Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada

Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa.

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1 Tahapan Penelitian

Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap sangat mempengaruhi Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu: (1) Dana Alokasi Umum, (2) Dana Alokasi Khusus, (3) Dana Bagi Hasil, (4) Dana Desa, (5) PDRB Perkapita.

2.4.2 Kerangka Analisis



Gambar 2. 3 Kerangka Analisis Penelitian

243 Kerangka Konseptual Model Etimasi



Gambar 2. 4 Bagan Konseptual Model

Dalam Model ini, Variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, dan PDRB Perkapita merupakan variable bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap pertumbuhan IPM, yang dimana IPM merupakan variable terikat.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitianterdahulu, terdapat pengaruh dana alokasi umum (DAU),dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH),alokasi dana desa (ADD), dan PDRB Perkapita terhadap indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah mini riset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang akan disajikan adalah data data time series yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang akan dihimpun mencakup wilayah di Indonesia.

3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variable yang satu dengan variable yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variable yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) , Dana Desa (DD), dan PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Variabels	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan Variabel
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Tingkat kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan Ekonomi dalam satuan persen	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id	Variable Terikat
Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah (dalam satuan Triliun)	Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id	Variabel Bebas
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Alokasi dana yang bersumber dari APBN kepada wilayah tertentu (dalam satuan Triliun)	Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id	Variabel Bebas
Dana Bagi Hasil (DBH)	Alokasi DBH bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase (dalam satuan Triliun)	Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id	Variabel Bebas
PDRB Perkapita	PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu.(Ribu Rupiah)	Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id	Variabel Bebas
DD (Dana Desa)	Dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan desa dalam (milyar rupiah)	Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id	Variabel bebaas

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data setiap Provinsi di Pulau Sumatera. Dengan melihat data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan RI.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yang dimulai dari Juni sampai dengan Agustus 2023.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala *numerik* (angka), yang dibedakan menjadi data *interval* dengan data *rasio*. Data *interval* adalah data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sedangkan, data *rasio* adalah data yang diukur dengan suatu proporsi. (Gujarati, 2013).

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan RI dan data dalam bentuk buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *website-website* resmi Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan objek penelitian 10 provinsi di pulau sumatera yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau,

Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung dan kurun waktu selama 6 tahun (2017 – 2022).

3.6 Teknik Analisis Tujuan Penelitian

3.6.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Mengenai Perkembangan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera Pasca Tahun 2017-2022

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi Pulau Sumatera pasca tahun 2017-2022.

3.6.2 Analisis Model Ekonometrika

A. Model Etimasi

Model Etimasi pada penelitian ini adalah model regresi data panel yang menggabungkan data *time series* (t) dengan data *cross section* (i) memiliki bentuk umum model Ekonometrika menggunakan data panel di tunjukkan oleh notasi “ it ” sebagai berikut : (Mujarat Kuncoro) : Model dalam penelitian ini sama dengan model milik Azis, A., Tampubolon, D., & Desweni, S. P. (2022). Untuk membedakannya penulis menambahkan model Dana Desa dan PDRB Perkapita sebagai tanda adanya perbedaan.

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 DD + \beta_5 PDRBKAP + \alpha_{it} + \mu_{it} \quad (1)$$

Dimana :

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
DAU	= Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)
DAK	= Dana Alokasi Khusus (Ribuan Rupiah)
DBH	= Dana Bagi Hasil (Ribuan Rupiah)
DD	= Dana Desa (Ribuan Rupiah)
PDRBKAP	= Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Ribuan Rupiah)
β_0	= Intersep (Konstanta)
β_1	= Koefisien regresi
i	= Data <i>Cross Section</i>
t	= Data <i>Time Series</i>
α	= unobserved factor, menunjukkan nilai antar-cross section
μ	= Disturbance error

B. Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variable yang diamati menggunakan data data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) dalam kurun waktu 6 tahun (dari tahun 2017 sampai 2022). Terdapat tiga ragam model yang di hasilkan dalam Model Panel Data, yakni model *common effect* (CEM), model *fixed effect* (FEM), dan model *random effect* (REM). Metode estimasi yang digunakan dalam Model Panel Data adalah Panel OLS (Panel *Ordinary Least Squares*). Untuk masing-masing model adalah sebagai berikut.

1. *Common Effect Model (CEM)*

Model CEM sering kali di sebut sebagai bentuk paling sederhana dalam Model Regresi dengan data panel. Bahkan hasil etimasinya terkesan tidak ada bedanya dengan model regresi yang sering digunakan. Hal tersebut karena tujuan penggunaan

model CEM adalah mendapatkan jumlah data yang mencukupi dalam proses estimasi namun tidak perlu menggunakan data time series dengan periode waktu yang panjang. Cara yang mudah tentu saja mengkombinasikan data *time series dan cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data *cross section* sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Panel *Ordinary Least Square* (OLS) atau Teknik kuadrat terkecil untuk menyetimasi model data panel.

Bentuk umum model CEM dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = Variabel terikat pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

X_{it} = Variabel bebas pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

β = Koefisien slope atau koefisien arah

α = Intercept model regresi

ϵ_{it} = Komponen error pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Asumsi penting yang digunakan dalam model FEM bahwa nilai perbedaan antarindividu (ditunjukkan oleh *unobserved factor*) dapat berkorelasi dengan variabel bebas. Estimasi yang digunakan adalah Panel OLS. Terdapat beberapa Teknik estimasi yakni least square dummy variable (LSDV), between estimator, dan within estimator.

Masing-masing adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Dimana nilai intersep untuk masing-masing unit *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$\alpha_i = \alpha + \mu_i; \quad i = 1, 2, \dots, N \dots \dots \dots (4)$$

Dimana μ_i adalah *unobservable individual effects*. Persamaan (3) dapat juga ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (5)$$

Dalam pendekatan ini, μ_i diasumsikan berkorelasi dengan regressor X atau dapat dikatakan bahwa μ_i bersifat tidak random.

3. *Random Effect Model (REM)*

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar-individu dan atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error dari suatu model. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section.

Pendekatan ini dapat ditulis dengan persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + w_{it} \dots \dots \dots (6)$$

Error term sekarang adalah w_{it} yang terdiri dari u_i dan ε_{it} , dimana u_i adalah cross section (random) error component, sedangkan ε_{it} adalah combined error component, sehingga pendekatan efek acak ini sering disebut Error Component Model (ECM).

Persamaan (6) dapat dimodifikasi menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + u_i + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (7)$$

Perbedaan mendasar antara FEM dan REM adalah asumsi mengenai unobservable individual effects (u_i) dimana REM mengasumsikan u_i bersifat random atau tidak berkorelasi dengan regressor X .

C. Tahap Analisis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan corrected atau adjusted R^2 (Kuncoro, 2018).

2. Pengujian (Test Diagnostik)

a. Uji Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013).

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh DAU, DAK, DBH, DD, PDRB Perkapita Terhadap IPM. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan pdrb perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di pulau sumatera)

Hipotesis $H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan pdrb perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di pulau sumatera)

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah:

$$t_h = \dots\dots\dots(3.4)$$

dimana:

β_1 = Dana Alokasi Umum

β_2 = Dana Alokasi Khusus

β_3 = Dana Bagi Hasil

β_4 = PDRB Perkapita

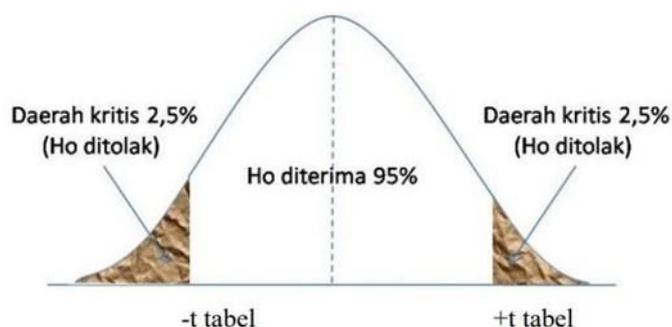
β_5 = Dana Desa

se β_i = Standar error β_i

3. Kriteria Uji :

Terima H_0 jika $- t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$, hal lain tolak H_0

atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Kesimpulan :

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD), dan PDRB Perkapita secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Dengan langkah Langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

- a. Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan pdrb perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di pulau sumatera)
- b. Hipotesis $H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan pdrb perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di pulau sumatera).

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$F = \frac{(\quad)}{(\quad)} \dots \dots \dots (3.5)$$

Dimana:

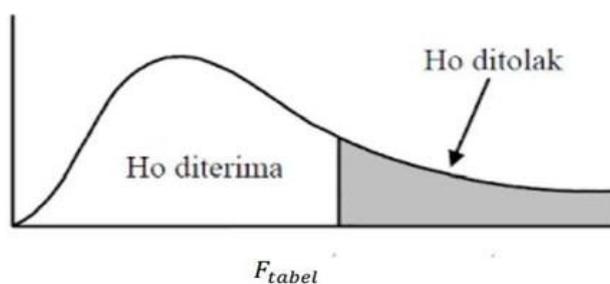
k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang diobservasi

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$

3. Kriteria Uji :

Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut :



4. Kesimpulan terima atau tolak H_0 : Memberikan kesimpulan sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

a. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (Blue Linear Unbiased Estimator) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinieritas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

a) **Multikolinieritas**

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003).

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendekteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah

jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi auxiliary maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

b) Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observation R-Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

c) Uji Hausman

Uji hausman dapat di definisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat di gunakan.

Pengujian uji hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0 : Random Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Uji hausman akan mengikuti distribusi chi-squares sebagai berikut :

$$S_m = q \text{ Var } (q) - 1 q$$

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi-Square dengan degree of freedom sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model random effect.

d) Uji Chow

Langkah pertama adalah memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan uji Chow dengan hipotesis:

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha = \dots = \alpha_N = \alpha$ (Common Effect Model)

H_1 : minimal ada satu yang berbeda. (Fixed Effect Model) $i = 1, 2, 3, \dots, N$

Dengan bantuan Eviews 10 didapatkan nilai statistik uji $F = 10,081$. Sedangkan nilai $F_{0,05(19,78)} = 1,70$, dimana $F > F_{0,05(19,78)}$. Jadi H_0 ditolak yang artinya intersep untuk semua unit cross section tidak sama, sehingga model persamaan regresi yang lebih sesuai adalah Fixed Effect Model (FEM).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pulau Sumatera

4.1.1 Kondisi Geografis

Sumatera adalah salah satu pulau besar yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus pulau yang luas di wilayah Samudra Hindia bagian Timur. Luas dari Pulau Sumatera adalah 473,481 km² terletak di bagian barat gugusan kepulauan Nusantara .

Bentuk Pulau Sumatera memanjang dari Ulee Lheue di Utara sampai ke Tanjung Pinang di Selatan. Panjang pulau ini sekitar 1.650 km dengan lebar di Utara antara 100 dan 200 km, dengan lebar bagian Selatan berkisar 350 km. Pulau Sumatera terletak pada 95° Bujur Timur (BT) - 105° Bujur Timur (BT) dan 6° Lintang Utara (LU) - 6° Lintang Selatan (LS). Letak astronomis tersebut, membuat Pulau Sumatera memiliki iklim tropis. Pulau ini dilewati oleh garis 0 derajat atau yang dikenal dengan nama garis khatulistiwa.

Terdapat 10 provinsi yang mengelola pulau emas ini, yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan ditambah 2 provinsi hasil pemekaran yaitu Bangka Belitung yang dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau yang dimekarkan dari Provinsi Riau.

Secara umum, pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu, yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku-suku besar ialah Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau,

Komering, dan Lampung. Di wilayah pesisir timur Sumatera dan di beberapa kotakota besar seperti Medan, Palembang, dan Pekanbaru, banyak bermukim etnis Tionghoa. Penduduk pulau Sumatera hanya terkonsentrasi di wilayah Sumatera Timur dan dataran tinggi Minangkabau. Mata pencaharian penduduk Sumatera sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan pedagang.

Penduduk Sumatera mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil merupakan penganut Protestan, terutama di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Di wilayah perkotaan, seperti Medan, Pekanbaru, dan Palembang, dijumpai beberapa orang penganut Buddha.

Sumatera merupakan kawasan episentrum gempa bumi karena dilintasi oleh patahan kerak bumi di sepanjang Bukit Barisan, yang disebut Patahan Sumatera; dan patahan kerak bumi di dasar Samudera Hindia di sepanjang lepas pantai sisi barat Sumatera. Keadaan alam di Pulau Sumatra yang bisa diamati pada peta meliputi beberapa kenampakan geografis seperti dari gunung, sungai, dataran rendah dan pantai.

4.1.2 Kondisi Topografi

Pulau Sumatera memiliki topografi atau bentuk muka bumi yang berbeda antara wilayah barat dan timur nya. Pada bagian barat pulau, terbentang Bukit Barisan yang membujur dari utara hingga ke selatan. Diantaranya terdapat gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Kerinci yang ada di Provinsi Jambi.

Sedangkan pada daerah Timur Pulau Sumatera banyak dijumpai sungai dan rawa. Sungai yang mengalir biasanya merupakan sungai besar yang bermuara pada pantai timur Sumatera. Contoh sungai nya adalah : Sungai Asahan (Sumatera Utara),

Sungai Musi (Sumatera Selatan), Sungai Siak (Riau), dan Sungai Enim (Sumatera Selatan). Selain sungai, pulau Sumatera juga memiliki banyak danau, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Laut Tawar (Aceh), Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Ranau (Sumatera Selatan), dan Danau Tes (Bengkulu).

Nama-nama gunung di Pulau Sumatra contohnya Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, Gunung Masurai, Gunung Talamau, Gunung Marapi, dan Gunung Sinabung. Nama-nama sungai di Pulau Sumatra Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, dan Sungai Lematang. Nama-nama dataran rendah di Pulau Sumatra contohnya Dataran Rendah Air Hitam, Dataran Rendah Danau Emas, dan Dataran Rendah Anggi Giji.

4.1.3 Luas Wilayah

Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi yang didalamnya terdapat 154 kabupaten dan kota dengan luas 473.481 km². Dari total 154 kabupaten dan kota terbagi menjadi 120 kabupaten dan 34 kota. Berikut dibawah ini jumlah Kabupaten dan Kota yang ada di Pulau Sumatera:

Tabel 4. 1 Jumlah Kabupaten dan Kota Provinsi di Pulau Sumatera

No	Nama Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Luas (Km ²)
1	Aceh	18	5	56.839
2	Sumatera Utara	25	8	72.891
3	Sumatera Barat	12	7	42.120
4	Riau	10	2	89.936
5	Jambi	9	2	205,4
6	Sumatera Selatan	13	4	91.592
7	Bengkulu	9	1	151,7
8	Lampung	13	2	33.554
9	Kep. Bangka Belitung	6	1	16.691
10	Kep. Riau	5	2	8.270
	Jumlah	120	34	412.250

Sumber : Badan Pusat Statistik

4.1.4 Kondisi Deografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Pulau Sumatera tahun 2022 mengalami kenaikan dimana dari hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 59.185,80 jiwa. Naik menjadi 59.977,30 jiwa. Komposisi penduduk dibagi dalam tiga kelompok umur yaitu kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 20.000,00 jiwa (25,52%), Kelompok umur 15-64 tahun 29.000,30 jiwa (69,52%), Kelompok umur 64 tahun ke atas sebanyak 10.977,00 jiwa (4,94%).

Berikut dibawah ini jumlah penduduk menurut provinsi yang ada di pulau Sumatera :

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

PROVINSI	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	
	2021	2022
Aceh	5.333,70	5.407,90
Sumatera Utara	14.936,20	15.115,20
Sumatera Barat	5.580,20	5.640,60
Riau	6.493,60	6.614,40
Kep. Riau	2.118,20	2179,8
Jambi	3.585,10	3631,1
Sumatera Selatan	8.550,90	8.657,00
Kep. Bangka Belitung	1.473,20	1.494,60
Bengkulu	2.032,90	2.060,10
Lampung	9.081,80	9.176,60
Sumatera	59.185,80	59.977,30

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat kita lihat pada Tabel 4.2 Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera adalah Sumatera Utara dimana jumlah penduduknya sebesar 15.115,20 jiwa di tahun 2022 dan disusul oleh Lampung Selesai dengan jumlah Penduduk 9.176,60 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kepulauan Riau dengan jumlah 2179,8 jiwa.

B. Angkatan Kerja

Berikut dibawah ini jumlah penduduk menurut komposisi penduduk menurut angkatan kerja di provinsi yang ada di pulau sumatera:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Sumatera 2022

Provinsi	Bekerja	Pengangguran
Aceh	2.394.994	157.568
Sumatera Utara	7.197.374	472.496
Sumatera Barat	2.688.164	180.106
Riau	3.168.929	144.889
Jambi	1.797.819	86.459
Sumatera Selatan	4.289.704	208.256
Bengkulu	1.037.496	38.619
Lampung	4.387.966	207.965
Bangka-Belitung	730.972	36.631
Kepulauan Riau	1.155.997	103.715
Sumatera	28.849.415	1.636.704

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022 di Pulau Sumatera Terdapat 1.636.704 penduduk yang tergolong pengangguran dan 28.849.415 penduduk berkerja. Tingkat partisipasi Angkatan kerja tahun 2022 untuk provinsi sumatera utara menduduki posisi tingkat pengangguran paling tinggi yaitu 472.496 penduduk dan di susul oleh sumatera selatan yaitu 208.256 penduduk. Sedangkan untuk Angkatan kerja yg sedang bekerja paling banyak 7.197.374 penduduk.

4.1.5 Kondisi Ekonomi

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan dan struktur ekonomi suatu daerah dalam suatu kurun waktu. Berikut jumlah *produk domestik regional bruto* di Pulau Sumatera :

Tabel 4. 4 Jumlah Nilai PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)		
	Harga Konstan 2010		
	2022	2021	2020
Aceh	140.947.64	35.251.19	131.580.97
Sumatera Utara	573.528.77	547.651.82	533.746.36
Sumatera Barat	182.629.54	175.000.50	169.426.61
Riau	529.532.98	506.471.91	489.995.75
Jambi	161.717.68	153.825.49	148.354.25
Sumatera Selatan	343.483.65	326.411.27	315.129.22
Bengkulu	499.16.06	47.853.78	46.338.43
Lampung	257.534.19	246.966.49	240.319.59
Kep. Bangka Belitung	578.03.20	553.69.65	52.705.94
Kep. Riau	190.163.70	180.952.44	174.959.21
JUMLAH	2.437.341,35	2.194.802,10	2.302.556,33

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022 PDRB Pulau Sumatera atas harga konstan 2.437.341,35 Milyar Rupiah naik bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 2.194.802,10. Kondisi perekonomian pulau sumatera menunjukkan pergerakan naik dan stabil pada tahun 2022.

B. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRBKAP)

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Berikut jumlah PDRB Perkapita di Pulau Sumatera :

Tabel 4. 5 Jumlah PDRB Perkapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah)		
	Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022
Aceh	25.018,28	25.357,70	26.063,50
Sumatera Utara	36.175,16	36.666,20	37.943,83
Sumatera Barat	30.696,21	31.360,79	32.377,51
Riau	76.884,74	77.995,51	80.057,79
Jambi	41.926,04	42.906,66	44.536,39
Sumatera Selatan	37.323,24	38.172,97	39.676,95
Bengkulu	23.105,92	23.539,17	24.230,02
Lampung	26.746,64	27.193,59	28.064,39
Kep. Bangka Belitung	36.307,61	37.585,50	38.674,15
Kep. Riau	85.012,58	85.425,89	87.238,26
Jumlah	419.196,42	426.203,98	438.862,79

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 Kepulauan Riau memiliki jumlah PDRB Perkapita paling tinggi yaitu 87.238,26 Ribu Rupiah. Artinya PDRB per kapita provinsi Kepulauan Riau meningkat dari tahun sebelumnya.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Kondisi di mana masyarakat suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi Sumatra tumbuh positif. Kontribusinya terhadap nasional mencapai 21 persen, menempati urutan kedua setelah Jawa. Sektor pertanian dan pertambangan minyak, gas dan panas bumi merupakan penyumbang terbesar.

Tabel 4. 6 Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi			
	2020	2021	2022
Aceh	-0,37	2,79	4,21
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73
Sumatera Barat	-1,61	3,29	4,36
Riau	-1,13	3,36	4,55
Jambi	-0,51	3,69	5,13
Sumatera Selatan	-0,11	3,58	5,23
Bengkulu	-0,02	3,27	4,31
Lampung	-1,66	2,77	4,28
Kep. Bangka Belitung	-2,29	5,05	4,4
Kep. Riau	-3,8	3,43	5,09
Jumlah	-12,57	33,84	46,29

Sumber : Badan Pusat Statistik

D. Inflasi

Inflasi yaitu kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung secara terus menerus dan diikuti dengan menurunnya nilai mata uang dan daya beli masyarakat. Inflasi yang sering terjadi pada dasarnya terjadi karena kenaikan biaya produksi seperti BBM, Kenaikan Upah yang menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya produksi yang pada akhirnya akan mendorong para produsen akan meningkatkan harga barang yang dijual di pasar.

Jika proses ini berlangsung dalam waktu yang lama akan menyebabkan inflasi tinggi. Selain itu inflasi juga bisa disebabkan karena adanya peningkatan jumlah permintaan seperti pada saat lebaran, natal dan hari-hari besar lainnya hampir semua

harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan karena banyaknya permintaan dan jika hal ini berlangsung lama tentu saja akan menyebabkan inflasi.

Tabel 4. 7 Inflasi Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	Tahun			Rata Rata (%)
	2020	2021	2022	
Aceh	3,54	2,22	5,78	3,84
Sumatera Utara	0,79	3,92	4,68	3,13
Sumatera Barat	2,11	1,40	7,43	5,47
Riau	2,4	1,99	6,67	3,6
Jambi	13,99	27,3	67,57	36,28
Sumatera Selatan	1,51	1,83	5,81	3,05
Bengkulu	0,89	2,42	5,92	3,07
Lampung	2,00	2,19	5,51	3,23
Kep. Bangka Belitung	1,08	3,75	5,38	3,40
Kep. Riau	1,18	2,26	5,83	3,09

Sumber : Badan Pusat Statistik

4.1.6 Kondisi Sosial

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Angka kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera, pada September 2022 presentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Presentase penduduk miskin Bengkulu juga lebih tinggi dibandingkan presentase penduduk miskin nasional (Indonesia).

Berikut beberapa tabel angka kemiskinan yang ada di Pulau Sumatera :

Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa) di Pulau Sumatera

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa)		
	2020	2021	2022
Aceh	1648,82	1684,5	1625,29
Sumatera Utara	2640,01	2616,93	2530,28
Sumatera Barat	709,02	710,6	679,03
Riau	974,61	997,47	978,16
Jambi	565,9	573,72	563,19
Sumatera Selatan	2201,23	2230,37	2099,68
Bengkulu	608,58	597,79	590,16
Lampung	2140,46	2090,95	1998
Kep. Bangka Belitung	140,44	142,41	136,47
Kep. Riau	274,58	282,21	300,57
JUMLAH	11903,65	11926,95	11500,83

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 4. 9 Presentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera

Provinsi	Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)		
	2020	2021	2022
Aceh	30,42	30,86	29,39
Sumatera Utara	17,89	17,5	16,75
Sumatera Barat	12,84	12,67	11,96
Riau	13,86	14,12	13,62
Jambi	15,55	15,76	15,32
Sumatera Selatan	25,64	25,63	23,85
Bengkulu	30,33	29,65	28,96
Lampung	25,1	24,29	23,01
Kepulauan Bangka Belitung	9,42	9,57	9,06
Kepulauan Riau	12,05	11,87	12,27

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel di atas dapat di lihat mencatat Provinsi Aceh masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Serambi Mekah itu kini berjumlah 834 ribu orang atau 15,11%. Jumlah penduduk miskin di Aceh periode September 2020 hingga Maret 2021 mengalami penurunan secara persentase dari 15,43% menjadi 15,33%. Selain itu, pandemi COVID-19 dinilai menjadi pemicu. Pandemi berdampak terhadap penduduk usia kerja menjadi pengangguran, ada yang tidak bekerja hingga pengurangan jam kerja.

Tabel 4. 10 Garis Kemiskinan di Pulau Sumatera

Provinsi	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)		
	2020	2021	2022
Aceh	2112685	2213081	2421288
Sumatera Utara	2010106	2118194	2296415
Sumatera Barat	2185601	2295644	2528599
Riau	2198484	2325529	2535087
Jambi	2009787	2131690	2365341
Sumatera Selatan	1786370	1865190	2025401
Bengkulu	2165640	2301661	2499984
Lampung	1876000	1975265	2172241
Kep. Bangka Belitung	2896514	3051262	3314799
Kep. Riau	2429352	2541664	2777533
Jumlah	21670539	22819180	24936688

Sumber : Badan Pusat Statistik

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI). HDI digunakan untuk membedakan apakah suatu negara maju, berkembang, atau terbelakang, dan juga digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dengan terpenuhinya fasilitas umum, masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usaha secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya menciptakan kehidupan yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat.

Tabel 4. 11 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera

Provinsi	2021	2022	Rata Rata
Aceh	72,18	72,8	72,49
Sumatera Utara	72	72,71	72,35
Sumatera Barat	72,65	73,26	72,95
Riau	72,94	73,52	73,23
Jambi	71,63	72,14	71,88
Sumatera Selatan	70,24	70,9	70,57
Bengkulu	71,64	72,16	71,9
Lampung	69,9	70,45	70,17
Kep. Bangka Belitung	71,69	72,24	71,96
Kep. Riau	75,79	76,46	76,12

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Sumatera memiliki nilai rata-rata sebesar 70,60. Nilai maksimum IPM sebesar 76,12 yang diperoleh dari Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022. Nilai minimum IPM sebesar 70,17 diperoleh oleh Provinsi Lampung pada tahun 2022. Standar deviasi IPM sebesar 1,8521.

3. Gini Rasio

Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali.

Tabel 4. 12 Gini Rasio Provinsi di Pulau Sumatera

No.	Provinsi	Rasio Gini			
		2019 (September)	2020 (September)	2021 (September)	2022 (September)
1	Provinsi Aceh	0.321	0.319	0.323	0.291
2	Provinsi Sumatera Utara	0.315	0.314	0.313	0.326
3	Provinsi Sumatera Barat	0.307	0.301	0.3	0.292
4	Provinsi Riau	0.331	0.321	0.327	0.323
5	Provinsi Jambi	0.324	0.316	0.315	0.335
6	Provinsi Sumatera Selatan	0.339	0.338	0.34	0.33
7	Provinsi Bengkulu	0.329	0.323	0.321	0.315
8	Provinsi Lampung	0.331	0.32	0.314	0.313
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0.262	0.257	0.247	0.255
10	Provinsi Kepulauan Riau	0.337	0.334	0.339	0.325

Sumber : Badan Pusat Statistik

4.2 Analisis Tujuan Penelitian

4.2.1 Analisis Ekonomi Secara Deskriptif Tentang Perkembangan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera Tahun 2017-2022

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2017).

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam (SDA)

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam. Yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunanya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Terutama jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

2. Sumber daya manusia (SDM)

Kedua, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. SDM berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal. Karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. SDM adalah faktor terpenting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana SDM selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sumber daya

alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

3. Akumulasi modal

Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas IPTEK. Modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Tenaga manajerial dan organisasi produksi

Lalu, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah organisasi produksi dan tenaga manajerial. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

5. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih

berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

6. Faktor politik dan administrasi pemerintah

Dari sisi non ekonomi, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi.

7. Aspek sosial budaya

Berikutnya, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan barat membawa arah penalaran dan skeptisisme menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru.

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua

elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi- provinsi kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan.

Desentralisasi fiskal sejauh ini sudah memberikan dampak positif terhadap otonomi daerah di Indonesia namun belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Instrumen-instrumen hukum yang ada dalam mengatur desentralisasi fiskal kini berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membangun kegiatan

perekonomian daerah dan menjadi landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi fiskal di masa yang akan datang.

Terlebih penting lagi adalah dengan adanya desentralisasi fiskal, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik yang sifatnya langsung disalurkan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung disalurkan, seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan demikian penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik akan lebih terjamin.

Tabel 4. 13 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	2.060.263.235.000	191.892.691.947	2.322.266.506.000	1.956.492.796.000	2.010.367.360.000	1.947.783.847.000
Sumatera Utara	2.629.224.545.000	2.629.224.545.000	2.713.750.553.000	2.474.465.343.000	2.545.202.693.000	2.463.686.589.000
Sumatera Barat	2.014.646.639.000	2.014.646.639.000	2.076.398.191.000	1.891.323.979.000	1.949.470.283.000	1.887.033.911.000
Riau	1.457.997.067.000	1.465.117.719.834	1.548.578.928.000	1.432.349.278.000	1.503.538.311.000	1.455.383.959.000
Jambi	1.397.912.161.000	939.049.860.012	1.433.203.410.000	1.288.418.327.000	1.327.397.167.000	1.248.884.150.000
Sumatera Selatan	1.697.897.817.000	1.697.762.032.483	1.743.742.960.000	1.568.602.615.000	1.614.757.701.000	1.563.041.287.000
Bengkulu	1.301.538.847.000	1.300.978.160.419	1.334.178.390.000	1.219.949.535.000	1.253.924.758.000	1.213.764.868.000
Lampung	1.851.595.354.000	1.854.701.094.160	1.906.780.297.000	1.732.551.921.000	1.783.414.286.000	1.726.296.248.000
Kep. Bangka Belitung	980.297.314.000	1.018.435.174.809	1.046.862.622.000	942.308.451.000	970.636.972.000	940.858.778.000
Kep. Riau	1.059.822.693.000	1.150.516.796.000	1.190.057.596.000	1.099.291.405.000	1.129.091.346.000	1.092.929.539.000

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah)

Dilihat dari Gambar 4.1 perkembangan dana alokasi umum tahun 2017-2022 di Pulau Sumatera mengalami peningkatan yang kurang stabil . Pada tahun 2017 jumlah Dana Alokasi Umum tertinggi di terima provinsi sumatera utara sebesar Rp. 2,629,224,545,000 dan pada tahun 2017 terendah pada provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp.980,297,314,000. Pada tahun 2022 Dana Alokasi Umum tertinggi terdapat di provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.2,463,686,589,000 dan terendah di provinsi Kep.Bangka Belitung sebesar Rp. 940,858,778,000.

Tabel 4. 14 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah)

PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	1,489,203,024,109	1,483,635,794,660	1,744,873,155,047	1,762,270,401,566	1,792,354,521,321	1,832,521,352,454
Sumatera Utara	3,838,053,061,062	3,912,060,867,549	4,205,592,917,360	4,404,599,180,988	4,449,135,664,000	4,556,214,754,212
Sumatera Barat	1,701,323,404,671	1,784,401,030,483	1,844,831,704,011	1,965,523,936,884	2,257,907,336,130	1,023,444,858,630
Riau	1,607,851,461,589	1,641,194,885,303	1,913,695,539,610	2,000,906,541,174	2,238,765,453,987	2,543,732,221,098
Jambi	934,827,673,236	1,399,367,134,000	1,067,008,374,054	1,116,093,491,331	1,324,543,675,234	1,674,345,231,445
Sumatera Selatan	855,483,708,566	2,171,297,782,406	2,259,489,236,940	2,333,802,709,438	2,662,901,865,542	2,934,241,432,126
Bengkulu	635,034,086,232	110,698,383,373	695,715,144,166	728,523,356,970	878,245,873,663	921,365,789,228
Lampung	542,809,262,080	745,585,220,581	581,870,716,694	571,540,325,831	688,992,124,576	783,234,869,095
Kep. Bangka Belitung	438,826,469,824	460,227,704,831	491,156,874,143	545,345,060,864	646,909,807,302	684,390,256,050
Kep. Riau	569,776,571,430	590,028,178,611	645,650,636,625	723,205,571,644	745,342,579,414	786,315,564,543

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah)

Dilihat dari Gambar 4.1 perkembangan dana alokasi khusus tahun 2017-2022 di Pulau Sumatera mengalami peningkatan . Pada tahun 2017 jumlah Dana Alokasi Khusus tertinggi di terima provinsi sumatera utara sebesar Rp. 3,838,053,061,062 dan pada tahun 2017 terendah pada provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp. 438,826,469,824. Pada tahun 2022 Dana Alokasi Khusus tertinggi terdapat di provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,556,214,754,212 dan terendah di provinsi Kep.Bangka Belitung sebesar Rp. 684,390,256,050.

Tabel 4. 15 Perkembangan Dana Bagi Hasil di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah)

PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	253,413,238,471	191,892,691,947	625,063,809,440	541,585,506,501	162,572,926,000	230,239,005,000
Sumatera Utara	460,857,333,851	513,849,016,717	381,304,117,881	468,683,588,422	449,398,195,000	504,060,634,000
Sumatera Barat	152,435,926,311	131,766,541,404	106,119,220,485	145,620,965,052	127,202,047,000	136,301,826,000
Riau	1,473,538,188,595	1,721,610,679,708	1,674,431,560,210	1,832,897,015,531	1,205,183,684,000	1,435,718,653,000
Jambi	390,520,754,714	406,804,973,987	396,542,022,347	444,609,573,625	277,341,310,000	363,840,158,000
Sumatera Selatan	1,507,731,845,979	1,643,957,685,525	1,695,468,982,642	1,933,269,369,100	1,191,372,209,000	1,423,060,984,000
Bengkulu	61,311,707,511	66,368,734,844	46,258,205,454	71,140,797,650	61,617,044,000	62,508,561,000
Lampung	249,340,043,381	216,041,063,250	138,544,335,416	157,793,963,126	135,366,665,000	178,797,860,000
Kep. Bangka Belitung	120,836,218,678	215,555,879,603	204,414,067,706	117,160,284,746	152,890,551,000	165,966,646,000
Kep. Riau	526,669,661,632	537,458,002,746	737,447,035,580	459,765,163,578	238,251,189,000	357,421,916,000

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah)

Dilihat dari Gambar 4.3 perkembangan dana bagi hasil tahun 2017-2022 di Pulau Sumatera mengalami peningkatan . Pada tahun 2017 jumlah Dana Bagi Hasil tertinggi di terima provinsi sumatera selatan sebesar Rp. 1,507,731,845,979 dan pada tahun 2017 terendah pada provinsi Bengkulu sebesar Rp. 61,311,707,511. Pada tahun 2022 Dana Bagi Hasil tertinggi terdapat di provinsi Riau sebesar Rp. 1,435,718,653,000 dan terendah di provinsi Bengkulu sebesar Rp. 62,508,561,000.

Tabel 4. 16 Perkembangan Dana Desa Provinsi di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah)

PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	4,892,571,795	4,457,512,950	4,708,512,781	4,877,030,710	4,986,622,301	4,990,677,654
Sumatera Utara	4,197,972,490	3,874,857,829	4,452,049,366	4,735,517,994	4,531,290,998	4,689,765,876
Sumatera Barat	796,538,971	790,787,312	932,325,519	961,135,348	992,597,548	1,087,032,231
Riau	1,269,305,925	1,254,688,851	1,436,685,874	1,470,374,080	1,484,805,437	1,546,432,091
Jambi	1,090,942,601	1,037,674,061	1,184,558,060	1,121,847,436	1,222,139,342	1,334,432,153
Sumatera Selatan	2,267,261,445	2,309,392,954	2,683,946,345	2,712,779,047	2,692,090,359	2,785,110,675
Bengkulu	1,035,340,413	945,638,279	1,079,418,707	1,011,687,037	1,085,362,570	1,131,214,876
Lampung	1,957,487,721	2,091,398,105	2,427,111,117	2,454,053,315	2,441,161,413	2,543,092,231
Kep. Bangka Belitung	261,661,579	264,571,725	309,831,614	321,740,760	334,531,471	343,342,876
Kep. Riau	228,182,536	221,500,941	261,333,056	273,346,685	276,396,391	282,908,321

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah)

Dilihat dari Gambar 4.4 perkembangan Dana Desa tahun 2017-2022 di Pulau Sumatera mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah Dana Desa tertinggi di terima provinsi Aceh sebesar Rp. 4,892,571,795 dan pada tahun 2017 terendah pada provinsi Kep.Riau sebesar Rp. 228,182,536. Pada tahun 2022 Dana Desa tertinggi terdapat di provinsi Aceh sebesar Rp. 4,990,677,654 dan terendah di provinsi Kep.Riau sebesar Rp. 282,908,321 .

Tabel 4. 17 Perkembangan PDRB Perkapita di Pulau Sumatera (Ribu Rupiah)

PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	23,362.90	24,013.79	24,842.30	25,018.28	25,357.70	26,063.50
Sumatera Utara	34,183.58	35,570.50	36,853.59	36,175.16	36,666.20	37,943.83
Sumatera Barat	29,312.17	30,470.80	31,427.29	30,696.21	31,360.79	32,377.51
Riau	70,740.43	70,736.77	72,509.14	76,884.74	77,995.51	80,057.79
Jambi	38,833.87	40,025.52	41,812.35	41,926.04	42,906.66	44,536.39
Sumatera Selatan	34,059.71	35,659.82	37,125.75	37,323.24	38,172.97	39,676.95
Bengkulu	21,751.64	22,494.84	23,504.53	23,105.92	23,539.17	24,230.02
Lampung	26,614.88	27,736.26	28,894.50	26,746.64	27,193.59	28,064.39
Kep. Bangka Belitung	34,933.52	35,762.04	37,173.14	36,307.61	37,585.50	38,674.15
Kep. Riau	79,743.68	81,206.20	81,138.52	85,012.58	85,425.89	87,238.26

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah)

Dilihat dari tabel 4.17 perkembangan PDRB Perkapita tahun 2017-2022 di Pulau Sumatera mengalami peningkatan . Pada tahun 2017 jumlah PDRB Perkapita tertinggi di terima provinsi Kep.Riau sebesar Rp. 79,743.68 dan pada tahun 2017 terendah pada provinsi Bengkulu sebesar Rp. 21,751.64. Pada tahun 2022 PDRB Perkapita tertinggi terdapat di provinsi Kep.Riau sebesar Rp. 87,238.26 dan terendah di provinsi Bengkulu sebesar Rp. 24 .230,02 .

Tabel 4. 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera

PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	70.60	71.19	71.90	71.99	72.18	72.80
Sumatera Utara	70.75	71.18	71.74	71.77	72.00	72.71
Sumatera Barat	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26
Riau	71.79	72.44	73.00	72.71	72.94	73.54
Jambi	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63	72.14
Sumatera Selatan	68.86	69.63	70.02	70.01	70.24	70.90
Bengkulu	69.95	70.64	71.21	71.40	71.64	72.16
Lampung	68.25	69.02	69.57	69.69	69.9	70.45
Kep. Bangka Belitung	69.99	70.67	71.3	71.47	71.69	72.24
Kep. Riau	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79	76.46

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Dilihat dari tabel 4.18 perkembangan IPM tahun 2017-2022 di Pulau Sumatera mengalami peningkatan . Pada tahun 2017 jumlah IPM tertinggi di terima provinsi Kep.Riau sebesar 74,45 persen dan pada tahun 2017 terendah pada provinsi Lampung sebesar 68,25 persen. Pada tahun 2022 IPM tertinggi terdapat di provinsi Kep.Riau sebesar 76,46 persen dan terendah di provinsi Lampung sebesar 76,46 persen.

4.2.2 Hasil Analisis Ekonometrika

Setelah dilakukan estimasi data panel yaitu mencakup *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*, maka langkah selanjutnya menentukan model estimasi mana yang cocok untuk dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Langrange Multiplier* (LM). Uji *Langrange Multiplier* dilakukan dengan catatan apabila setelah uji *Chow* model yang tepat digunakan yaitu *fixed effect* dan setelah uji *Hausman* model yang digunakan yaitu *random effect*. Namun apabila pada uji *Chow* dan uji *Hausman* model yang tepat digunakan adalah *fixed effect* maka tidak perlu dilakukan uji LM. Berikut merupakan uji statistik estimasi data panel:

1. Uji Chow

Pada uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat model yang tepat digunakan antara *common effect* dan *fixed effect*. Dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.566674	(9,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	104.568172	9	0.0000

Sumber : Eviews 12(diolah)

Gambar 4. 1 Hasil Uji Chow

Pada tabel di atas diketahui bahwa probabilitas F adalah $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa metode *Fixed Effect* lebih baik digunakan. Selanjutnya untuk membandingkan *fixed effect* dan *random effect* digunakan uji *Hausman*. Yang perlu diperhatikan adalah perbandingannya dengan *Chi-Square Table*, jika *Hausman statistic* lebih besar dari *Chi-Square Table* maka H_1 diterima.

Jika *hausman statistic* lebih kecil daripada *chi square table* maka H_0 diterima.

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Uji Hausman menggunakan program *evIEWS* menunjukkan hasil sebagai berikut:

2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan dengan tujuan untuk melihat model mana yang tepat digunakan antara *fixed effect* dan *random effect*. Dengan hasil regresi sebagai berikut:

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	33.050919	5	0.0000

Sumber : *EvIEWS 12(diolah)*

Gambar 4. 2 Hasil Estimasi Uji Hausman

Hasil regresi *fixed effect* vs *random effect* di atas didapat *probabilitas cross section* pada *random effect* sebesar 0.0000, artinya menolak H_0 . Jadi, bisa disimpulkan bahwa metode yang paling tepat adalah *fixed effect*.

Setelah dilakukan uji kelayakan model dengan uji *Chow* dan uji *Hausman*, kesimpulannya model yang baik digunakan adalah model *fixed effect*. Dengan begitu tidak perlu dilakukan uji *Langrange Multiplier* (LM).

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 08/23/23 Time: 15:06
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.58883	1.579411	37.72850	0.0000
DAU	-2.34E-13	2.45E-13	-0.953611	0.3454
DAK	1.50E-14	2.40E-13	0.062408	0.9505
DBH	6.68E-13	4.69E-13	1.423664	0.1614
DD	1.64E-09	4.40E-10	3.731779	0.0005
PDRBKAP	0.000215	4.07E-05	5.271085	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.952152	Mean dependent var	71.68917
Adjusted R-squared	0.937266	S.D. dependent var	1.703905
S.E. of regression	0.426773	Akaike info criterion	1.347191
Sum squared resid	8.196103	Schwarz criterion	1.870777
Log likelihood	-25.41574	Hannan-Quinn criter.	1.551995
F-statistic	63.96260	Durbin-Watson stat	1.135664
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Eviews 12 (diolah)

Gambar 4. 3 Hasil Fixed Effect

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* FEM.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih adalah FEM, maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang diinginkan adalah multikolinieritas dan heterosdastisitas.

1. Uji Multikolenialitas

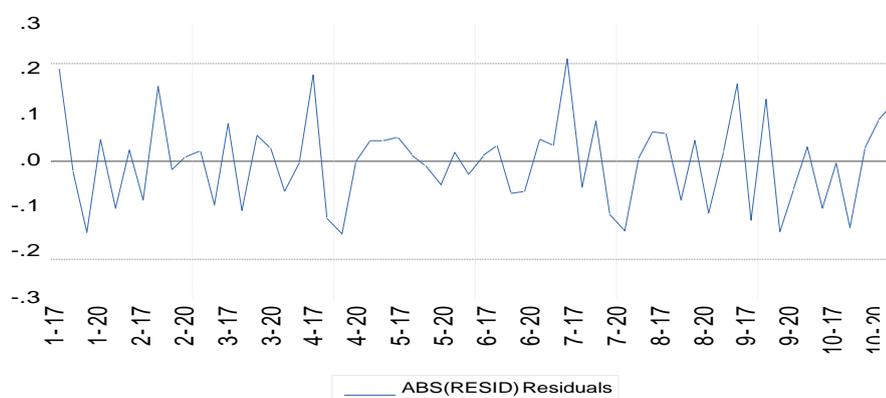
	DAU	DAK	DBH	DD	PDRBKAP
DAU	1.000000	0.702214	0.043475	0.655415	-0.299537
DAK	0.702214	1.000000	0.325237	0.651739	-0.029752
DBH	0.043475	0.325237	1.000000	0.101643	0.459646
DD	0.655415	0.651739	0.101643	1.000000	-0.401575
PDRB...	-0.299537	-0.029752	0.459646	-0.401575	1.000000

Sumber : eviews 12 (diolah)

Gambar 4. 4 Uji Multikolenialitas

Koefisien korelasi DAU dan DAK sebesar $0,702214 < 0,85$, DAU dan DBH sebesar $0,655415 < 0,85$, dan DAU dan DD sebesar $0,655415 < 0,85$, DAU dan PDRBKAP sebesar $-0,299537$ dan DAK dan DBH sebesar $0,325237$. Maka dapat disimpulkan bahwa bebas multikolenialitas.

2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Eviews 12 (diolah)

Gambar 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik abs(recid) residuals (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Persamaan Regresi Data Panel

$$IPM = 59.58 - 2.34DAU + 1.49DAK + 6.68DBH + 1.64DD + 0.00PDRBKAP$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 59.58 artinya tanpa adanya variabel DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP maka variabel IPM akan mengalami peningkatan sebesar 59.58%.

- 2) Nilai koefisien beta variabel DAU sebesar 2.34, jika nilai variabel lain konstan dan variabel DAU mengalami peningkatan 1%, maka variabel IPM akan mengalami peningkatan sebesar 34%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel DAU mengalami penurunan 34%, maka variabel IPM akan mengalami penurunan sebesar 34%.
- 3) Nilai koefisien beta variabel DAK sebesar 1.49, jika nilai variabel lain konstan dan variabel DAK mengalami peningkatan 1%, maka variabel IPM akan mengalami peningkatan sebesar 1%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel DAK mengalami penurunan 49%, maka variabel IPM akan mengalami penurunan sebesar 49%.
- 4) Nilai koefisien beta variabel DBH sebesar 6.68, jika nilai variabel lain konstan dan variabel DBH mengalami peningkatan 1%, maka variabel IPM akan mengalami peningkatan sebesar 1%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel DBH mengalami penurunan 68%, maka variabel IPM akan mengalami penurunan sebesar 68%.
- 5) Nilai koefisien beta variabel DD sebesar 1.64, jika nilai variabel lain konstan dan variabel DD mengalami peningkatan 1%, maka variabel IPM akan mengalami peningkatan sebesar 1%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel DD mengalami penurunan 64%, maka variabel IPM akan mengalami penurunan sebesar 64%.
- 6) Nilai koefisien beta variabel PDRBKAP sebesar 0.01, jika nilai variabel lain konstan dan variabel PDRBKAP mengalami peningkatan 1%, maka variabel IPM akan mengalami peningkatan sebesar 1%. Begitu pula sebaliknya, jika

nilai variabel lain konstan dan variabel PDRBKAP mengalami penurunan 1%,
maka variabel IPM akan mengalami penurunan sebesar 1%.

Hasil Uji Hipotesis

1) Hasil Uji t

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 08/24/23 Time: 09:45
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.64343	1.578943	37.77428	0.0000
DAU	-2.30E-13	2.46E-13	-0.935916	0.3543
DAK	1.74E-14	2.41E-13	0.072429	0.9426
DBH	6.46E-13	4.69E-13	1.376021	0.1756
DD	1.64E-09	4.42E-10	3.712778	0.0006
PDRBKAP	0.000214	4.08E-05	5.237511	0.0000

Gambar 4. 6 Hasil Uji t

Sumber : Eviews 12 (diolah)

Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut :

- a. Hasil uji t pada variabel DAU diperoleh nilai t hitung sebesar $0,961853 < t$ tabel yaitu 2.001717 dan nilai sig $0,3543 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, Artinya variabel DAU tidak berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia.
- b. Hasil uji t pada variabel DAK diperoleh nilai t hitung sebesar $0,072429 < t$ tabel yaitu 2.001717 dan nilai sig $0,9426 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, Artinya variabel DAK tidak berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia.

- c. Hasil uji t pada variabel DBH diperoleh nilai t hitung sebesar $1,376021 < t$ tabel yaitu 2.001717 dan nilai sig $0,1756 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, Artinya variabel DBH tidak berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia.
- d. Hasil uji t pada variabel DD diperoleh nilai t hitung sebesar $3,712778 > t$ tabel yaitu 2.001717 dan nilai sig $0,0006 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, Artinya variabel DD berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia.
- e. Hasil uji t pada variabel PDRBKAP diperoleh nilai t hitung sebesar $5,237511 > t$ tabel yaitu 2.001717 dan nilai sig $0,0000 > 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, Artinya variabel PDRBKAP berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia.

2) Uji F

R-squared	0.951919
Adjusted R-squared	0.936960
S.E. of regression	0.427812
Sum squared resid	8.236026
Log likelihood	-25.56151
F-statistic	63.63697
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Eviews 12 (diolah)

Gambar 4. 7 Hasil Uji F

Nilai F hitung sebesar $63,63697 > F$ tabel yaitu 2.386069 dan nilai sig $0,000000 < 0,05$, Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, Artinya Variabel DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP berpengaruh terhadap IPM.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.951919
Adjusted R-squared	0.936960
S.E. of regression	0.427812
Sum squared resid	8.236026
Log likelihood	-25.56151
F-statistic	63.63697
Prob(F-statistic)	0.000000

Gambar 4. 8 Hasil Uji Determinasi

Nilai adjusted R square sebesar 0,936960 atau 93,6960%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP mampu menjelaskan variabel IPM di Pulau Sumatera sebesar 93,6960% sedangkan sisahnya yaitu 6,304% (100-nilai adjusted r square) di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Analisa Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Pulau Sumatera dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengujian model menggunakan uji chow menunjukkan bahwa model FEM lebih tepat digunakan dari pada model PLS. Selanjutnya, dengan dilakukannya uji Hausman menunjukkan model FEM lebih tepat digunakan di bandingkan dengan model REM. Oleh karena itu, penelitian ini memutuskan menggunakan model FEM karena model FEM lebih tepat dari pada model PLS dan REM.
- 2) Berdasarkan uji validitas pengaruh pada signifikasi (α) sebesar 0,05 berdasarkan uji statistic F (uji F) variabel DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP secara serempak berpengaruh signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia di Pulau Sumatera tahun 2017-2022.
- 3) Hasil uji koefisien determinan (R^2) menunjukkan besarnya nilai R-square sebesar 0,936 atau 93,69%, artinya 93,69% variasi variabel Indeks Pembanguna Manusia mampu menjelaskan dari DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP di Pulau Sumatera, dan sisahnya sebesar 6,304% (100-nilai adjusted r square) di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini.

B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan melihat hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dapat memprioritaskan dan meningkatkan derajat desentralisasi fiskal dengan memanfaatkan semua potensi daerah secara optimal.
2. Pertumbuhan penduduk harus ditekan karena berdampak negatif terhadap Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera, hal ini dikarenakan penduduk di masing-masing provinsi di Sumatera Utara masih memiliki kualitas rendah.
3. Adanya keterbatasan waktu dan sumber data dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian selanjutnya data tahunan yang digunakan bisa lebih update dan bisa memasukkan variabel-variabel yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat.Statistika (BPS) Indonesia 2023. www.bps.go.id
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. www.kemenkeu.go.id
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, 9(1), 1-11.
- Azis, A., Tampubolon, D., & Desweni, S. P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012-2020. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 41-52.
- Fitria, A., Weriantoni, W., Saibah, B. R. A. M., & Sufiawan, N. A. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 46-53.
- Izzati, A. N., Laut, L. T., & Hutajulu, D. M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Diy Tahun 2010-2019. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(1), 69-86.
- Safitri, J. (2022). Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa 2016-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 259-267.
- RS, Prawidya Hariani. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA: PENINGKATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA PROVINSI SE-INDONESIA." *Simposium Nasional Keuangan Negara 1.1* (2018): 1066-1086.
- Rahman, T. (2018). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Zulyanto, A. (2010). *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Mankiw, N. Gregory, 2003. Teori Makro Ekonomi. *Jakarta: Erlangga*.
- Samudra, Galang, and Nur Handayani. 2020. "Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(4).
- TodaraoP.M. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga Edisi ke Delepan*. Jakarta: Erlangga.

- Adiputra, dkk. 2015. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali periode 2008-2013*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015.
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal Daerah, dan Elastisitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Inklusif Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>
- Gudjarati D. 2004. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta. Erlangga.
- Gujarati. Damodar N dan down C. Porter. 2012 *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta. Salemba Erlangga.
- Kuncoro, M. (2016). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, edisi 3. Jakarta. PT RajaGrafinfo Persada
- Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). *Pertumbuhan ekonomi indonesia perspektif ekonomi islam: peran inflasi, pengeluaran pemerintah, hutang luar negeri dan pembiayaan syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 223-238.
- Dinar, M., & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Makassar: CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Kumorotomo, W. (2008). *Merit System Dalam Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah*. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Sun'an, M. & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Smith, P. K., Shernan, S. K., Chen, J. C., Carrier, M., Verrier, E. D., Adams, P. X., ... & PRIMO-CABG II Investigators. (2011). *Effects of C5 complement inhibitor pexelizumab on outcome in high-risk coronary artery bypass grafting: combined results from the PRIMO-CABG I and II trials*. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 142(1), 89-98.

- Nair, R., Jhingan, S., & Jain, D. (2012). Cosmokinetics: a joint analysis of standard candles, rulers and cosmic clocks. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2012(01), 018.
- Manik, R. E., & Hidayat, P. (2010). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Pemekaran di Sumatera Utara.
- Basuki, A.T., & Yuliadi, I. (2014). *Elektronik Data Processing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Danisa Media.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H, Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C.,E. (2021). *Penelitian bisnis. Teknik dan Analisa dengan SPSS STATA -Eviews. I ed.* Madentera

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**(Curriculum Vitae)****A. DATA PRIBADI**

Nama : LUTHFI TANIA SARAGIH
Tempat/Tgl.Lahir : Lubuk Pakam, 05 April 2001
Alamat : Jl. Utama GG.Ampera 1 No.240D, Medan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
No. Telepon : 085836167830
Email : luthfisaragih893@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

✓ MIS ISLAMIYAH LONDUT	2013-2015
✓ SMP NEGERI 3 KUALUH HULU	2015-2017
✓ SMA NEGERI 1 KUALUH HULU	2017-2019
✓ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	2019- Now

C. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Tajuddin Saragih
Nama Ibu : Sriyani